

KONSEP KEBIJAKAN LEMBAGA BULOG DALAM AGENDA KEDAULATAN PANGAN

Wira Aji Firmansyah
Prista Alem Suteja
Dian Suluh Kusuma Dewi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa
Timur 63471
wiraajifirmansyah@gmail.com
pristaalem30@gmail.com
suluh.dian@gmail.com

Abstrak

Beras berperan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia, melalui produksi padi oleh para petani, yang sebagian besar adalah rakyat Indonesia sendiri. Kebutuhan pangan berupa beras memang berlaku bagi seluruh kalangan, khususnya bagi kalangan menengah kebawah. Dalam hal ini, pemerintah tentu mempunyai peranan penting untuk mengendalikan harga, membeli, serta menjual dan menyediakan pasokan beras melalui lembaga BULOG. Kebijakan pengadaan beras BULOG sudah menjadi tugas Perum BULOG berdasarkan Intruksi Presiden No.05 Tahun 2015 tentang pengadaan beras bulog yang mana menginstruksikan tanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan beras serta pengendalian menyeluruh. Dalam rangka pembangunan ekonomi, pemenuhan ketahanan pangan harus di tingkatkan bagi hajat hidup rakyat dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Karena beras telah menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat Indonesia, maka hal ini juga menandakan bahwa sektor pertanian merupakan agenda utama untuk mendukung perekonomian dan konsep ketahanan pangan Nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep serta kebijakan lembaga BULOG dalam agenda ketahanan pangan di Indonesia, melalui metode deskriptif kualitatif pengamatan secara mendalam dan terfokus sebagai sumber data. Serta dianalisis menggunakan model interaktif (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan).

Kata Kunci : Konsep, Kebijakan, Pangan

Abstract

Rice brings a big role in fill up the basic needs for Indonesian society, because of rice production by farmers, which mostly of farmer is the part of own Indonesian society. Rice demand was valid for all off people in Indonesia, especially for the lower-middle class. For this reason, the government certainly plays an important

role in controlling prices, buying, and selling, then providing the rice supply through BULOG institution. The rice supply policy has been a primary Perum BULOG by the President's instructions No. 05 Tahun 2015 about the supply of rice and through control. As for economic development, food fulfillment must be increased to meet the needs of people in both short and long periods of life. Because of rice is the main needs of Indonesian people, this also make agriculture sector is the main agenda for support the economic and national food security concept. This letter is explains about a concept and policy of BULOG institution on the Indonesian food security agenda, throught a qualitative descriptive method with deeped observation as a source of data. And analyzed using interactive models from Miles & Hubberman (reductiion, presentation, deduction drawing).

Keyword : *Concept, Policy, Food*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang dominan pada sector pertanian, tentunya merupakan sebuah kekayaan aset tersendiri yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Sejak zaman dahulu, dapat dikatakan bahwa sector pertanian telah menjadi arus penggerak roda ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ni juga disokong dengan prinsip dan semangat gotong royong untuk terus mempertahankan kelangsungan hidup, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Bahkan perkembangan zaman tidak serta merta membawa dampak yang signifikan terhadap pola hidup masyarakat Indonesia, yang memang telah terbiasa bertani maupun bercocok tanam. Sebagai salah satu contoh, di Kota Jember Jawa Timur dikatakan bahwa kontribusi dari sector pertanian yang menjadi faktor paling menyokong perekonomian, serta telah meningkatkan sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Jember (Putra, Ani, & Hartanto, 2018).

Pada akhirnya hal ini memicu Pemerintah Indonesia untuk melakukan perencanaan, evaluasi, penerapan, maupun persiapan untuk terus mempertahankan kedaulatan pangan sebagai Negara agraris. Pikiran besar pemerintah, pada dasarnya adalah untuk melayani dan menata sector pangan bagi seluruh masyarakat dengan mekanisme implementasi kebijakan secara tepat.

Sasaran utamanya adalah rakyat kecil, yang identik dengan penghidupan di bawah garis kemiskinan. Kemudian, untuk menafsir berbagai kemungkinan yang

terjadi apabila terjadi gejolak maupun permasalahan ke depannya dalam mempertahankan kedaulatan pangan. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan yang ada pada ketentuan (MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 2016) bahwa penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS- PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Hal ini secara tidak langsung juga memberikan beban tambahan dan perhatian khusus kepada para petani terutama petani padi, demi menjaga keseimbangan mutu dan kualitas yang stabil. Disini pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan pasang- surut harga di pangsa pasar, walaupun hal ini juga termasuk intervensi yang dapat dimaklumi untuk tujuan efisiensi ekonomi yang merata hingga ke desa-desa.

Menurut Orasi Ilmiah dari (Sawit, 2010) ada awal orde baru, kebijakan harga ditetapkan melalui HDG (Harga Dasar Gabah). Adapun penetapan HDG ditentukan oleh berbagai variabel dan formula. Formula yang dipakai berubah dari waktu ke waktu, pada awalnya harga dasar mengacu pada rumus tani yaitu : Harga per kg gabah kering sama dengan harga per kg urea. Serta dibarengi dengan kebijakan penekanan impor oleh pemerintah (Maulana, 2012). Selain itu, untuk menjamin keseluruhan harga agar stabil (terutama saat panen), pemerintah melakukan kontrol melalui BULOG sebagai pihak terkait dengan cara melakukan pembelian gabah petani apabila dalam kondisi yang tertekan dibawah harga dasar. Hal ini juga bertujuan sebagai langkah untuk stabilisasi yang menysasar kepada kondisi dan harga beras yang akan dipasarkan.

Melalui BULOG, pemerintah melakukan perpanjangan tangan untuk intervensi serta monopoli terhadap segala aspek yang ada baik dari aspek produksi dan distribusi. Lembaga pangan seperti BULOG secara menyeluruh memang telah memegang konsep kendali terhadap stabilitas sector pangan yang mencakup berbagai komoditi di dalamnya. Sebagian besar penduduk Indonesia

mengonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis.

Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin (MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 2016).

BULOG memiliki peranan sentral untuk menetapkan berbagai instrumen kebijakan untuk menysasar masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, serta menentukan perbedaan harga dasar beras pada tiap-tiap daerah sesuai dengan analisis penyesuaian (misalnya merangsang minat swasta). Maka dari itu, tak jarang dalam suatu penetapan bahwa lembaga BULOG juga tak jarang memiliki potensi untuk dikritisi oleh mitra yang ada terutama petani. Hal ini dapat muncul sewaktu-waktu, tidak dapat diramalkan keadaannya.

Hanya saja, BULOG memiliki tugas untuk melakukan antisipasi atau memperkirakan kemungkinan apabila terjadi gejolak yang menyangkut harga beli maupun nilai jual. Harga beli dan nilai jual yang dimaksud adalah lebih kepada hubungan antara produsen & konsumen, walaupun sama-sama masyarakat akan tetapi tingkat kesejahteraanya tentu berbeda. Apalagi jika dikaitkan dengan faktor lain seperti tingkat impor yang tidak terkendali, kualitas panen, dan sebagainya.

BULOG memiliki mekanisme yang selanjutnya diimplementasikan menjadi kebijakan, diantaranya adalah mekanisme pasar dan pemerataan stok yang tersedia di setiap gudang BULOG di Indonesia. Kemudian dalam ketetapan (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 2012) juga telah diberikan penjelasan mengenai tugas utama BULOG bagi public. Tugas public tersebut yaitu : (1) Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), (2)

Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah; (3) Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 2012).

Penulisan dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara detail, informatif, dan konkrit mengenai kasus yang diteliti.. Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam penelitian konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu. (Bungin, 2003), dalam (Pamungkas, 2014).

Objek penelitian ini di lakukan melalui objek (Kanal pemberitaan) yang ada dalam website resmi PERUM BULOG dengan teknik pengambilan data menggunakan pengamatan secara mendalam dan terfokus terhadap objek (pemberitaan media), serta di analisis menggunakan model interaktif (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan).

PEMBAHASAN

A. Definisi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan sangat identik dengan segala sesuatu maupun upaya yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, ataupun orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan terhadap suatu kelompok (masyarakat). Salah satunya adalah menurut (Iskandar, 2012) dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2016) bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Lebih lanjut, mengenai kebijakan Publik (Wahab, 2010) menyatakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan public merupakan tindakan yang sadar dan paham dalam rangka mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Tindakan ini adalah wujud dari pemikiran yang maju, karena didasari oleh orientasi penting.
- b. Kebijakan publik adalah suatu kesepakatan bersama yang melahirkan suatu pola di dalamnya, untuk digunakan sebagai arahan dalam melaksanakan tindakan ke depan.
- c. Kebijakan public adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan secara terukur, dalam berbagai bidang tertentu.
- d. Kebijakan public bersifat dua jenis, yakni positif apabila memungkinkan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan. Serta negative, apabila memilih untuk diam dan menunggu keadaan (tidak melakukan tindakan apapun).

Keseluruhan definisi kebijakan public diatas, adalah beberapa literature yang mendasari pemerintah untuk senantiasa melakukan tindakan dan sikap dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini juga termasuk ke dalam iniasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan lembaga BULOG yang selanjutnya menaungi berbagai urusan logistic, maupun lancarnya kesediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. Serta juga memperhatikan kesejahteraan para petani melalui penetapan harga pasar, pembelian yang layak, distribusi secara merata, dan lain sebagainya.

B. Konsep Kebijakan Bulog

BULOG dalam pilar ketahanan pangan, memiliki upaya dan konsep yang memadai. Hal ini sebanding dengan apa yang telah menjadi tugas dan fungsi utama bagi public. Sesuai dengan , tugas public BULOG adalah sebagai berikut :

Gambar 1.



Sumber : (www.bulog.co.id, 2020)

Beberapa konsep diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengadaan Gabah dan Beras Memperkuat Pilar Ketersediaan

Konsep Pengadaan gabah dan beras dalam negeri dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk intervensi berkelanjutan, sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur kebijakan pasca panen maupun pra panen. Di sisi lain, pemerintah juga membeirkan prioritas yang besar kepada kemakmuran kelompok petani melalui Harga Dasar agar menstabilkan harga beli konsumen dengan daya tawar dari para petani.

Adanya BULOG merupakan suatu terobosan pemerintah yang tentunya dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk berjalannya produksi beras dalam negeri. Hal ini merupakan suatu pemicu bagi para petani untuk tetap semangat dalam menjalankan pekerjaanya sehari-hari.

Disini kontribusi petani juga dapat dikatakan sebagai usaha kooperatif untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan Nasional. Artinya, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara tidak langsung telah melakukan sinergi yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara layak dan merata di setiap daerah.

Saat panen raya, BULOG melakukan pembelian terhadap gabah/beras dalam negeri. Suplay yang melimpah saat panen raya, mengakibatkan terjadinya "*marketed surplus*" di pangsa pasar. Keberhasilan BULOG dalam menghimpun stabilitas harga dasar beras nasional, dapat juga membantu peningkatan pendapatan petani di seluruh tanah air. Berdasarkan data yang diperoleh dari (www.bulog.co.id, 2020) bahwa selama ini rata-rata pembelian dan pengadaan yang dilakukan oleh BULOG adalah kisaran 5%-9% dari keseluruhan total produksi beras dalam negeri. Atau setiap tahunnya sekitar 1,5 – 3 juta ton beras.

2. RASKIN untuk Memperkuat Pilar Keterjangkauan (Accessibility)

Pengadaan Beras dalam negeri beberapa diantaranya disalurkan kepada kelompok RTM (Rumah Tangga Miskin) dimana hal ini juga sebagai salah satu sasaran untuk mengurangi angka kemiskinan. RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) adalah suatu program yang bertujuan untuk menekan pengeluaran bagi keluarga miskin, sehingga pendapatannya dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan lain. Secara otomatis, pengeluaran mereka akan berkurang dan juga secara tidak langsung permintaan beras di pasaran juga menurun.

RASKIN bertujuan untuk memelihara kedaulatan pangan dari mulai kelompok keluarga kecil, agar asupan energinya tercukupi setiap saat. Mengingat beras telah menjadi makanan pokok bagi Indonesia sejak lama, maka mau tidak mau pemerintah harus selalu menjaga program ini apabila angka kemiskinan tidak juga berkurang secara signifikan (bahkan terkesan jalan di tempat). Dalam pengertian lain, RASKIN juga disebut sebagai “social protection” karena potensi yang dimunculkan dari kebijakan ini adalah dapat mempengaruhi dampak perekonomian masyarakat. Artinya, secara massif program ini juga turut berfungsi sebagai :

- 1) Sarana perbaikan gizi yang merata
- 2) Upaya untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan (daya beli)
- 3) Upaya untuk menjaga kualitas SDM dan regenerasi peradaban.

3. Cadangan Beras Pemerintah Memperkuat Pilar Stabilitas

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Cadangan Beras Pemerintah adalah bagaimana pemerintah mampu untuk menyediakan pasokan yang cukup, berkualitas, dan terukur apabila sewaktu-waktu terdapat gangguan maupun situasi-situasi darurat seperti bencana alam (banjir, kekeringan, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya). Sudah menjadi tugas BULOG untuk mengelola dan melakukan operasional dalam permasalahan ini, dan tentunya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, kendala yang mungkin muncul dan terjadi adalah potensi konflik dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga menjadi faktor pendorong bagi pemerintah, untuk menjaga kestabilan Cadangan Beras bagaimanapun caranya. Walaupun harapan yang muncul adalah untuk tidak terjadi konflik maupun bencana, namun realita ke depan merupakan hal yang masih misteri dan tidak dapat dipastikan secara jelas.

Adapun berdasarkan data dari (www.bulog.co.id, 2020), Cadangan Beras telah teruji saat terjadi bencana Tsunami di NAD pada 2004 silam. Gempa bumi

di Yogya & Jateng, kekeringan di NTT, Kebakaran Riau, juga merupakan contoh & bukti yang nyata.

C. **Bukti Komitmen BULOG terhadap Kedaulatan Pangan**

Dalam kurun waktu decade terakhir, BULOG telah membuktikan komitmen terhadap pelayanan public melalui kanal berita yang tersedia di website resmi (www.bulog.co.id, 2020). Kanal berita tersebut telah menampilkan berbagai laporan dan pemberitaan secara kontinyu, yang tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan public agar tetap optimis dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Sebenarnya ada banyak sekali konsep kebijakan yang telah dilakukan oleh BULOG, baik bersifat rutin maupun incidental dari mulai masa berdirinya BULOG hingga saat ini. Beberapa contoh adalah dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, sebagai berikut :

1. **BULOG Jamin Ketersediaan Beras di Papua & Jambi**

Berita ini dapat diakses pada website resmi BULOG (www.bulog.co.id, 2020), dimana terdapat jaminan terhadap ketersediaan stok untuk menghadapi liburan panjang akhir tahun kemarin. Hal ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan BULOG dalam hal pengelolaan, analisis, serta pemahaman situasi dan kondisi lapangan.

Gambar 2



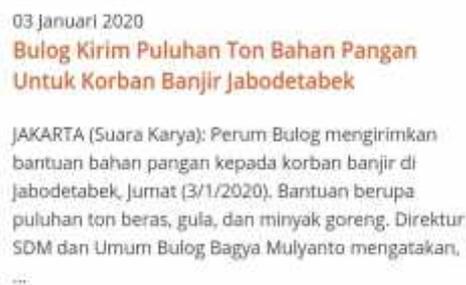
Sumber : (www.bulog.co.id, 2020)

2. **BULOG dalam Kebijakan Tanggap Bencana**

Banjir yang terjadi di Jakarta kemarin, nampaknya juga membawa dampak terhadap daerah-daerah sekitar (Jabodetabek). Hal ini memicu BULOG untuk melakukan pendistribusian terhadap prioritas utama korban banjir, sesuai dengan data lapangan yang ada.

Dalam hal ini, Direktur SDM Bulog Bagya Mulyanto memberikan paparan bahwa pihaknya melakukan upaya koordinasi dengan elemen aparat setempat untuk efisiensi pengiriman bantuan. Selain itu, Bulog juga menyediakan sejumlah perahu karet untuk membantu evakuasi, serta mengirimkan tenaga bantuan dari serikat pekerja karyawan guna mempercepat proses bantuan.

Gambar 3



Sumber : (www.bulog.co.id, 2020)

3. BULOG dalam Komitmen Pengendalian Harga

Gambar 4



Sumber : (www.bulog.co.id, 2020)

Stabilnya pasokan dan harga pangan menurut Agung Hendriandi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian pertanian), merupakan suatu upaya dan kinerja yang tidak lepas dari sinergitas antara BULOG dan lembaga lainnya dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek. Senada dengan Agung, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan (Risfaheri) mengatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan dalam menekan kestabilan harga adalah karena keberadaan Toko

Tani Indonesia (TTI) yang selama ini telah berhasil melakukan manajemen terhadap kebutuhan dan harga jual, sehingga dapat dengan mudah dibeli oleh masyarakat. Menurut keterangan Risfaheri, saat ini jumlah dari TTI yang ada dan tersebar di seluruh wilayah dalam negeri adalah 5.051.

KESIMPULAN

Agenda ketahanan pangan di Indonesia adalah salah satu proyek jangka panjang yang akan terus dilakukan, melalui berbagai macam survey maupun penerapan kebijakan secara langsung kepada masyarakat.

Kebutuhan pangan pada dasarnya memang menjadi tanggung jawab tersendiri, bagi seluruh masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga ikut andil dalam menata dan mengelola sistem produksi-distribusi melalui lembaga yang dibuatnya yakni BULOG.

Karena pada hakekatnya baik pemerintah maupun masyarakat memang telah secara sadar memahami, bahwa kebutuhan pangan adalah inti maupun pokok dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perumpamaan yang lain, kebutuhan pangan pada akhirnya dapat dikelola menjadi energi untuk menggerakkan, menghidupi, bahkan untuk membantu sesama. Maka dari itu peningkatan kualitas pangan dan kerja cepat pemerintah akan selalu dibutuhkan, baik di masa pemerintah sekarang maupun masa yang akan datang. Selama populasi manusia masih membludak, maka kebutuhan pangan akan terus diupayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03.*, (2012).
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Maulana, M. (2012). (*HPP*) *MULTIKUALITAS GABAH DAN BERAS DI INDONESIA Prospect o f Government ' s Purchase Price for Multi-Quality Rice in Indonesia*. 211–223.

- MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA. (2016). *Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016*. Jakarta, INDONESIA.
- Pamungkas, L. Y. (2014). *Evaluasi Kinerja KPU Kabupaten Ponorogo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014*. Retrieved from <http://eprints.umpo.ac.id/567/>
- Putra, F. H., Ani, H. M., & Hartanto, W. (2018). *KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB KABUPATEN JEMBER. 12, 2016–2019*. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.7589>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 1–12.
- Sawit, M. H. (2010). *Reformasi Kebijakan Harga Produsen dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras*. Bogor.
- Wahab, S. . (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.